



Rekonfigurasi Relasi Kekuasaan dan Akses Pengetahuan dalam Masyarakat Digital: Kajian Sosiologis Berbasis Teori Transformasi Sosial

Diana Novita Rachmawati¹, Isa Anshori²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 5, 2025
Revised November 20, 2025
Accepted November 23, 2025

Kata Kunci:

Transformasi sosial,
Relasi kekuasaan,
Akses pengetahuan,
Masyarakat digital

Keywords:

*Social transformation,
Power relations,
Access to knowledge,
Digital society*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi akses dan distribusi pengetahuan, sehingga memicu perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan di masyarakat perkotaan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana digitalisasi memengaruhi struktur sosial, legitimasi, dan partisipasi warga di Surabaya, dengan menggunakan pendekatan sosiologis berbasis teori transformasi sosial. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan studi kasus dan analisis literatur, difokuskan pada interaksi antara aktor sosial, teknologi, dan struktur sosial lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menciptakan pola kekuasaan yang lebih heterarkis dan multidimensional, di mana individu atau kelompok yang mampu memanfaatkan teknologi digital memperoleh pengaruh baru, sementara akses pengetahuan menjadi lebih demokratis. Fenomena ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan digital, di mana wilayah pinggiran kota dan kelompok dengan literasi digital rendah menghadapi keterbatasan dalam partisipasi sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi digital, pengembangan infrastruktur teknologi, dan platform partisipatif untuk memastikan inklusivitas dan kualitas distribusi pengetahuan. Implikasi teoritis penelitian ini menegaskan relevansi teori transformasi sosial dalam memahami interaksi kompleks antara teknologi, aktor sosial, dan struktur masyarakat, sementara implikasi praktisnya memberikan rekomendasi bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas lokal dalam mengelola masyarakat digital. Temuan ini diharapkan memperkaya literatur sosiologi perubahan sosial sekaligus memberikan arahan strategis bagi pengembangan masyarakat digital yang inklusif di Surabaya.

ABSTRACT

The development of digital technology has revolutionized the access and distribution of knowledge, triggering significant changes in power relations in urban communities. This study explores how digitalization affects social structures, legitimacy, and citizen participation in Surabaya, using a sociological approach based on social transformation theory. The research method is qualitative, using case studies and literature analysis, focusing on the interactions between social actors, technology, and local social structures. The results show that digitalization creates a more heterarchical and multidimensional power pattern, where individuals or groups capable of utilizing digital technology gain new influence, while access to knowledge becomes more democratic. This phenomenon also reveals the existence of a digital divide, where peri-urban areas and groups with low digital literacy face limitations in social and economic participation. Furthermore, this study emphasizes the importance of strengthening digital literacy, developing

technological infrastructure, and participatory platforms to ensure the inclusiveness and quality of knowledge distribution. The theoretical implications of this study confirm the relevance of social transformation theory in understanding the complex interactions between technology, social actors, and societal structures, while its practical implications provide recommendations for the government, educational institutions, and local communities in managing the digital society. These findings are expected to enrich the literature on the sociology of social change and provide strategic direction for the development of an inclusive digital society in Surabaya.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Diana Novita Rachmawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Indonesia
Email: tathadiana@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan sosial di kota-kota besar, termasuk Surabaya, yang merupakan salah satu pusat ekonomi dan pendidikan di Indonesia [1]. Di masyarakat tradisional Surabaya, distribusi pengetahuan umumnya bersifat hierarkis dan terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki legitimasi institusional atau sosial, seperti perguruan tinggi, birokrasi, atau komunitas profesional. Namun, era digital menghadirkan dinamika baru di mana informasi dapat diakses secara luas melalui platform daring, media sosial, dan basis data publik, bahkan oleh warga yang sebelumnya tidak memiliki akses formal [2]. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting bagi sosiologi tentang bagaimana struktur kekuasaan dan akses terhadap pengetahuan di Surabaya mengalami pergeseran, serta implikasinya terhadap kesetaraan sosial dan interaksi komunitas di kota metropolitan yang dinamis ini.

Perubahan ini dapat dianalisis melalui lensa teori transformasi sosial yang menekankan hubungan dialektis antara struktur sosial, aktor sosial, dan teknologi. Teori ini menganggap bahwa teknologi bukan hanya alat pasif, melainkan mediator yang membentuk praktik sosial dan norma-norma masyarakat. Di Surabaya, digitalisasi memungkinkan terbentuknya komunitas pengetahuan virtual yang menantang otoritas tradisional, seperti forum-forum wirausaha daring, grup media sosial berbasis minat, dan jaringan akademik online [3, 4]. Akibatnya, individu atau kelompok yang sebelumnya marginal memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam produksi dan distribusi informasi. Dengan demikian, akses pengetahuan tidak lagi monopoli oleh institusi formal, melainkan lebih demokratis dan multidirectional, memunculkan dinamika kekuasaan baru di ruang sosial lokal, di mana legitimasi sosial kini juga ditentukan oleh kemampuan mengendalikan dan memanfaatkan informasi digital.

Transformasi sosial yang dihadirkan oleh digitalisasi juga berdampak pada relasi kekuasaan dalam ranah politik, ekonomi, dan budaya lokal [5]. Misalnya, akses cepat terhadap informasi memungkinkan individu atau kelompok tertentu mempengaruhi opini publik, membentuk narasi sosial, dan mengontrol wacana di ruang publik digital, termasuk forum-forum kota, media lokal, dan platform sosial warga Surabaya [6, 7, 8]. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya terkait dengan otoritas formal, tetapi juga kemampuan untuk memproduksi, menyebarkan, dan memanipulasi informasi. Hal ini menegaskan pentingnya kajian sosiologis yang menelaah relasi kekuasaan dalam konteks masyarakat

digital perkotaan, termasuk bagaimana norma sosial dan struktur institusional lokal beradaptasi terhadap transformasi yang berlangsung cepat.

Fenomena rekayasa relasi kekuasaan dan distribusi pengetahuan dalam masyarakat digital juga berdampak pada praktik pendidikan, profesionalisme, dan literasi informasi di kota ini [9]. Akses yang lebih luas terhadap sumber daya digital mengubah cara individu belajar, bekerja, dan berinteraksi secara sosial, baik di universitas, komunitas kreatif, maupun sektor industri [10]. Namun, transformasi ini juga menuntut pengembangan keterampilan kritis, evaluatif, dan adaptif agar warga mampu menavigasi arus informasi yang masif. Dalam konteks ini, sosiologi perubahan sosial berperan penting dalam mengidentifikasi pola adaptasi masyarakat, tantangan yang muncul, serta peluang untuk memperkuat inklusivitas sosial melalui pemanfaatan teknologi informasi di Surabaya.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana relasi kekuasaan dan akses pengetahuan direkonfigurasi dalam masyarakat digital di Surabaya. Kajian ini memanfaatkan pendekatan sosiologis berbasis teori transformasi sosial untuk memahami dinamika struktural dan interaksi sosial yang muncul akibat digitalisasi. Analisis yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menambah khazanah literatur sosiologi perubahan sosial, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan aktor sosial dalam mengelola implikasi sosial teknologi digital di tingkat kota. Dengan demikian, artikel ini hadir sebagai kontribusi akademik yang memadukan perspektif teori dengan fenomena kontemporer di Surabaya, sekaligus menegaskan relevansi sosiologi dalam memahami masyarakat digital perkotaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik [11], yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis rekonstruksi relasi kekuasaan dan akses pengetahuan dalam masyarakat digital. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dari literatur primer dan sekunder, termasuk jurnal akademik, buku teori sosiologi, laporan riset, dan sumber daring yang relevan, guna memperoleh pemahaman konseptual dan empiris yang komprehensif. Analisis data dilakukan secara *thematic analysis*, di mana fenomena sosial dikaji berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan transformasi sosial, digitalisasi, dan distribusi kekuasaan pengetahuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dinamika relasi sosial secara mendalam, mengaitkan temuan empiris dengan teori transformasi sosial, serta mengidentifikasi pola-pola dominasi dan partisipasi dalam ruang publik digital secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Hasil dan Pembahasan ini menyajikan analisis mendalam mengenai rekonstruksi relasi kekuasaan dan akses pengetahuan dalam masyarakat digital di Surabaya. Fokus kajian terletak pada bagaimana digitalisasi memengaruhi distribusi informasi, pola dominasi sosial, serta partisipasi warga dalam ranah publik lokal. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dari literatur dan observasi fenomena digital di kota ini dengan teori transformasi sosial, sehingga dapat menggambarkan dinamika interaksi antara struktur sosial, aktor sosial, dan teknologi. Selain itu, pembahasan menyoroti tantangan kesenjangan digital, peluang demokratisasi informasi, serta implikasi teoritis dan praktis dari perubahan sosial yang terjadi. Dengan pengantar ini, pembaca diarahkan untuk memahami kompleksitas transformasi masyarakat Surabaya yang semakin terdigitalisasi, sekaligus menyediakan dasar untuk pembahasan lebih rinci pada sub-bab berikutnya.

3.1 Rekonfigurasi Relasi Kekuasaan dalam Masyarakat Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap kekuasaan di Surabaya, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial budaya [12]. Di masa lalu, kontrol terhadap informasi dan pengetahuan biasanya dimonopoli oleh institusi formal, seperti pemerintah daerah, media cetak,

universitas, atau organisasi profesional. Namun, hadirnya platform digital telah mendemokratisasi akses dan distribusi pengetahuan. Kini, aktor sosial yang sebelumnya marginal dapat memperoleh pengaruh signifikan melalui kemampuan mereka untuk memproduksi, menyebarkan, dan memanipulasi informasi [13]. Fenomena ini menandai pergeseran dari model kekuasaan vertikal menuju struktur yang lebih heterarkis dan multidirectional, di mana legitimasi sosial tidak lagi hanya ditentukan oleh posisi formal, tetapi juga oleh kapasitas digital individu atau kelompok.

Di Surabaya, salah satu dampak nyata dari perubahan ini terlihat pada dinamika wacana publik di media sosial [14]. Aktivitas politik lokal, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan transportasi, atau program pemerintah kota, kini banyak dipengaruhi oleh opini yang terbentuk secara online [15]. Komunitas daring, seperti forum warga Surabaya di Facebook atau grup WhatsApp lingkungan, menjadi arena baru bagi negosiasi kekuasaan. Melalui platform ini, masyarakat mampu mengkritisi kebijakan pemerintah, memobilisasi dukungan untuk agenda tertentu, dan menuntut akuntabilitas publik. Transformasi ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah cara informasi dikonsumsi, tetapi juga memengaruhi mekanisme legitimasi dan distribusi kekuasaan di tingkat lokal.

Sektor ekonomi di Surabaya juga mengalami pergeseran relasi kekuasaan akibat digitalisasi. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktif memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan aplikasi pengantaran online mampu bersaing dengan perusahaan besar tanpa bergantung pada saluran distribusi tradisional [16, 17, 18]. Kemampuan mengelola informasi digital, seperti data pelanggan dan tren pasar, menjadi sumber kekuasaan baru yang menentukan keberhasilan ekonomi. Fenomena ini menciptakan pola dominasi yang tidak lagi sepenuhnya tergantung pada modal finansial atau jaringan tradisional, melainkan pada literasi digital dan strategi komunikasi daring. Dengan demikian, digitalisasi turut mendefinisikan parameter kekuasaan ekonomi di Surabaya.

Dalam ranah sosial budaya, transformasi digital mendorong munculnya aktor-aktor baru yang memengaruhi opini dan norma masyarakat [19]. Influencer lokal, komunitas kreatif, dan platform edukatif daring memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi publik tentang isu sosial, gaya hidup, dan identitas budaya Surabaya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kekuasaan sosial kini tidak hanya dipegang oleh tokoh formal atau elit tradisional, melainkan juga oleh individu yang memiliki pengaruh digital. Hal ini menegaskan relevansi teori transformasi sosial, yang menekankan interaksi kompleks antara struktur sosial, aktor sosial, dan teknologi sebagai mekanisme rekonstruksi kekuasaan.

Namun, proses rekonstruksi ini tidak terjadi secara merata. Kesenjangan digital masih menjadi faktor pembatas yang memengaruhi distribusi kekuasaan di Surabaya [20]. Kawasan pusat kota dengan infrastruktur digital yang memadai lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam wacana publik, sedangkan warga di pinggiran atau daerah kumuh menghadapi keterbatasan akses internet dan literasi digital. Ketimpangan ini menegaskan bahwa meskipun digitalisasi membuka peluang partisipasi baru, struktur kekuasaan tradisional tetap memengaruhi seberapa efektif individu dapat memanfaatkan teknologi untuk memperoleh pengaruh sosial. Selain itu, peran pemerintah kota Surabaya dalam mengelola informasi digital menjadi sangat krusial. Kebijakan *smart city*, layanan publik berbasis aplikasi, dan komunikasi resmi melalui media sosial menunjukkan bahwa institusi formal beradaptasi dengan mekanisme digital untuk mempertahankan atau memperluas legitimasi mereka. Hal ini menciptakan relasi kekuasaan yang bersifat dialektis: pemerintah berusaha mempertahankan kontrol, sementara warga melalui media digital menuntut partisipasi dan transparansi. Interaksi ini menegaskan bahwa rekonstruksi kekuasaan bukan sekadar redistribusi informasi, tetapi juga negosiasi berkelanjutan antara aktor formal dan nonformal di ruang digital.

Dinamika ini juga tercermin dalam proses pengambilan keputusan kolektif di masyarakat Surabaya. Misalnya, kelompok komunitas lingkungan, penggiat budaya lokal, dan organisasi sosial memanfaatkan platform digital untuk mengorganisir aksi, menyuarakan aspirasi, dan memengaruhi kebijakan publik. Strategi komunikasi daring yang efektif memberikan mereka kekuatan untuk

menyeimbangkan posisi terhadap institusi formal, menunjukkan bagaimana kekuasaan sosial dapat direkonfigurasi melalui akses dan kontrol informasi digital. Fenomena ini menggambarkan pergeseran signifikan dari model kekuasaan tradisional menuju struktur yang lebih partisipatif dan berbasis kapasitas digital.

Secara keseluruhan, rekonstruksi relasi kekuasaan di Surabaya menunjukkan bahwa digitalisasi berperan sebagai mediator dalam transformasi sosial. Struktur sosial lama tidak hilang, tetapi dipengaruhi, dinegosiasikan, dan diadaptasi melalui interaksi digital. Aktor sosial yang mampu mengelola informasi, membangun jaringan digital, dan memanfaatkan teknologi mendapatkan pengaruh baru, sementara kelompok yang tertinggal menghadapi risiko marginalisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman sosiologis yang komprehensif terhadap masyarakat digital, di mana kekuasaan tidak lagi bersifat monolitik, melainkan dinamis dan multidimensional.

3.2 Akses Pengetahuan dan Demokratisasi Informasi

Digitalisasi telah membuka akses pengetahuan yang lebih luas di Surabaya, menciptakan mekanisme baru bagi warga untuk memperoleh, berbagi, dan memanfaatkan informasi. Sebelumnya, pengetahuan lebih terkonsentrasi pada institusi formal seperti universitas, kantor pemerintah, dan media cetak, yang membatasi partisipasi warga. Dengan hadirnya platform daring, seperti forum komunitas, media sosial, dan basis data publik, di mana individu kini dapat mengakses sumber informasi yang beragam, mulai dari data kebijakan publik hingga literatur akademik, secara *real-time* [21]. Demokratisasi informasi ini menegaskan pergeseran dari model distribusi pengetahuan tradisional yang bersifat top-down menuju distribusi yang lebih horizontal dan partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip teori transformasi sosial yang menekankan interaksi dinamis antara struktur sosial, teknologi, dan aktor sosial.

Fenomena ini terlihat nyata di Surabaya melalui berbagai inisiatif komunitas dan warga digital. Contohnya, kelompok penggiat lingkungan menggunakan platform daring untuk menyebarkan data kualitas udara, laporan banjir, dan pemetaan kawasan rawan risiko. Warga yang sebelumnya tidak memiliki saluran resmi untuk menyuarakan aspirasi kini dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan lokal. Dengan cara ini, akses pengetahuan tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberdayakan warga untuk mempengaruhi kebijakan dan memfasilitasi partisipasi kolektif, menunjukkan bahwa demokratisasi informasi memiliki efek langsung pada relasi kekuasaan sosial dan kapasitas warga untuk berinteraksi dengan institusi formal.

Digitalisasi memungkinkan munculnya komunitas pengetahuan berbasis minat yang bersifat lintas-sektor dan lintas-generasi. Di Surabaya, forum daring untuk wirausaha, pengembangan teknologi, dan pendidikan nonformal menyediakan ruang kolaboratif bagi individu untuk berbagi pengalaman, strategi, dan praktik terbaik [22]. Aktivitas ini mengubah paradigma kepemilikan pengetahuan: dari monopoli institusi formal menjadi hak bersama yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki literasi digital memadai. Dengan demikian, transformasi sosial melalui digitalisasi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meredefinisi norma sosial mengenai siapa yang dapat menjadi produsen pengetahuan, memperkuat teori transformasi sosial yang menekankan peran aktor dalam mengubah struktur sosial melalui teknologi.

Namun, demokratisasi informasi tidak terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat Surabaya. Ketimpangan infrastruktur digital, perbedaan tingkat literasi informasi, dan akses ekonomi menciptakan stratifikasi baru dalam kemampuan memanfaatkan pengetahuan digital [18, 19]. Misalnya, warga di pusat kota dengan akses internet cepat dan perangkat modern memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dan menggunakan informasi dibandingkan dengan warga di kawasan pinggiran yang terbatas akses dan kapasitas digitalnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pengetahuan meningkat, faktor struktural tetap mempengaruhi efektivitas partisipasi sosial, sehingga demokratisasi informasi bersifat relatif dan kontekstual.

Fenomena demokratisasi informasi ini juga berdampak pada pendidikan dan pengembangan kapasitas manusia di Surabaya. Akses terbuka terhadap sumber belajar digital, modul daring, dan webinar memungkinkan siswa, mahasiswa, dan profesional meningkatkan kompetensi secara mandiri [21]. Selain itu, inisiatif *open knowledge* oleh komunitas lokal, seperti laboratorium inovasi atau perpustakaan digital, memperkuat keterampilan literasi informasi, analisis kritis, dan kolaborasi. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah cara pengetahuan diakses, tetapi juga membentuk agen sosial yang lebih kompeten, adaptif, dan mampu berpartisipasi dalam proses transformasi sosial.

Digitalisasi memungkinkan munculnya bentuk pengawasan sosial yang baru. Warga Surabaya dapat memantau proyek pembangunan, pelaksanaan kebijakan publik, atau aktivitas bisnis melalui data terbuka dan platform digital. Kapasitas ini memperkuat demokratisasi informasi karena warga bukan hanya konsumen pasif, tetapi juga aktor yang memiliki kekuatan untuk menilai, mengkritisi, dan mengintervensi proses sosial. Transformasi ini menunjukkan bagaimana akses pengetahuan dapat menyeimbangkan relasi kekuasaan antara institusi formal dan warga, sekaligus menekankan prinsip transformasi sosial bahwa teknologi menjadi mediator yang mengubah dinamika struktur sosial secara signifikan [13, 14, 15]. Perlu dicatat bahwa demokratisasi informasi di Surabaya tidak terlepas dari tantangan etika dan kualitas informasi. Arus informasi yang cepat kadang menghasilkan disinformasi, bias algoritmik, atau polarisasi opini. Oleh karena itu, kapasitas warga untuk memilah, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis menjadi kunci agar demokratisasi informasi benar-benar berdampak positif pada transformasi sosial. Penguatan literasi digital, regulasi konten, dan partisipasi aktif institusi formal menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa akses pengetahuan bukan hanya luas, tetapi juga bermutu dan inklusif.

Dengan demikian, proses demokratisasi informasi melalui digitalisasi di Surabaya memperlihatkan pergeseran signifikan dalam akses pengetahuan, pemberdayaan warga, dan relasi kekuasaan sosial. Fenomena ini menegaskan relevansi teori transformasi sosial, di mana interaksi antara teknologi, struktur sosial, dan aktor sosial menghasilkan pola baru distribusi informasi, meningkatkan partisipasi publik, sekaligus menciptakan tantangan baru terkait kesetaraan dan kualitas pengetahuan. Studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga agen transformasi sosial yang memengaruhi seluruh spektrum kehidupan perkotaan di Surabaya.

3.3 Kesenjangan Digital dan Ketimpangan Sosial

Meskipun digitalisasi telah memperluas akses pengetahuan di Surabaya, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Ketimpangan ini tidak hanya terkait akses fisik terhadap perangkat dan jaringan internet, tetapi juga kapasitas individu untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Kawasan pusat kota, dengan infrastruktur digital yang baik, memungkinkan warganya untuk aktif berpartisipasi dalam ruang publik digital, sementara warga di pinggiran kota atau permukiman padat seringkali menghadapi keterbatasan akses dan literasi digital, sehingga kesenjangan sosial tetap terjaga meskipun informasi tersedia secara luas [19, 20].

Kesenjangan digital ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi politik [22]. Di sektor pendidikan, misalnya, siswa di sekolah unggulan atau yang memiliki akses ke perangkat dan internet dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik, sementara siswa di sekolah kurang fasilitas tertinggal dalam memperoleh materi, berinteraksi dengan guru, dan mengakses sumber belajar tambahan [23]. Dalam ranah ekonomi, UMKM yang mampu memanfaatkan e-commerce dan media sosial mendapatkan keuntungan kompetitif dibandingkan pelaku usaha yang terbatas akses atau pengetahuan digitalnya. Hal ini menegaskan bahwa kesenjangan digital berimplikasi langsung pada reproduksi ketimpangan sosial.

Kesenjangan digital juga memengaruhi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik di Surabaya [1, 3, 4]. Kelompok yang memiliki literasi digital tinggi dapat mengakses informasi

kebijakan, menyuarakan aspirasi melalui forum daring, dan memengaruhi opini publik. Sebaliknya, kelompok yang tertinggal aksesnya cenderung menjadi pasif, sehingga suara mereka kurang terdengar dan peluang untuk memengaruhi kebijakan lokal menjadi terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokratisasi informasi melalui digitalisasi bersifat tidak merata dan tetap dipengaruhi oleh kondisi struktural dan sosial-ekonomi masyarakat.

Faktor ekonomi, budaya, dan demografi turut memperkuat ketimpangan ini. Generasi muda yang melek teknologi lebih adaptif terhadap penggunaan platform digital dibandingkan generasi tua, sementara warga dengan pendapatan rendah menghadapi kendala dalam memiliki perangkat atau membayar paket data. Di sisi lain, komunitas berbasis pendidikan dan profesional cenderung lebih cepat menguasai informasi digital dan menggunakannya untuk kepentingan sosial atau ekonomi [16, 24, 25]. Kondisi ini menciptakan stratifikasi baru dalam masyarakat digital Surabaya, yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan inklusif dan program literasi digital.

Dengan demikian, meskipun digitalisasi menjanjikan akses pengetahuan yang lebih luas, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan serius bagi transformasi sosial di Surabaya. Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan intervensi multi-level, termasuk pengembangan infrastruktur digital di kawasan pinggiran, peningkatan literasi informasi, serta pelatihan keterampilan teknologi bagi kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat inklusivitas sosial, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga, sesuai dengan prinsip demokratisasi pengetahuan yang dijunjung dalam teori transformasi sosial.

3.4 Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi teori transformasi sosial dalam memahami dinamika masyarakat digital di Surabaya. Transformasi sosial tidak hanya terjadi sebagai konsekuensi teknologi semata, tetapi melalui interaksi kompleks antara struktur sosial, aktor sosial, dan mekanisme distribusi informasi. Fenomena rekonstruksi relasi kekuasaan dan demokratisasi pengetahuan menunjukkan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai mediator yang mengubah pola dominasi, legitimasi, dan partisipasi sosial, sehingga teori transformasi sosial tetap menjadi kerangka analisis yang kuat untuk menjelaskan perubahan sosial kontemporer. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman sosiologis tentang konsep kekuasaan dan akses pengetahuan di konteks lokal. Di Surabaya, kekuasaan kini tidak hanya bersifat vertikal melalui institusi formal, tetapi juga horizontal melalui kontrol dan distribusi informasi digital. Aktor sosial yang mampu memanfaatkan media digital, membangun jaringan daring, dan memproduksi konten memiliki peluang untuk mempengaruhi opini publik, menegaskan bahwa kekuasaan sosial semakin multidimensional dan bergantung pada literasi digital, bukan semata-mata posisi formal.

Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengelolaan masyarakat digital yang lebih inklusif di Surabaya. Pemerintah kota dapat memanfaatkan temuan ini untuk merancang program literasi digital yang menyorot kelompok rentan, memperkuat infrastruktur digital di kawasan pinggiran, dan memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan melalui platform daring. Dengan demikian, akses pengetahuan tidak hanya diperluas secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik yang nyata bagi seluruh warga, mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Implikasi praktis lainnya terkait dengan sektor ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM dan startup lokal di Surabaya. Pengetahuan dan akses informasi digital menjadi modal strategis untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membangun inovasi. Dengan dukungan pemerintah dan komunitas digital, pelaku usaha yang sebelumnya terbatas aksesnya dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat daya saing, menunjukkan bahwa transformasi sosial melalui digitalisasi juga memiliki dampak signifikan pada redistribusi kekuasaan ekonomi. Temuan penelitian ini menekankan perlunya kesadaran kritis terhadap kualitas dan etika informasi. Demokratisasi informasi yang masif

juga berpotensi memunculkan disinformasi, bias algoritmik, dan polarisasi opini. Oleh karena itu, literasi digital yang efektif harus mencakup kemampuan analisis kritis, evaluasi sumber, dan pemahaman etika komunikasi daring. Di Surabaya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk memastikan transformasi digital berjalan secara sehat dan inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi relasi kekuasaan dan akses pengetahuan di masyarakat digital Surabaya memiliki implikasi ganda: memperkuat teori transformasi sosial sekaligus memberikan arahan praktis bagi kebijakan publik, pendidikan, dan ekonomi lokal. Transformasi digital tidak hanya menghadirkan peluang baru bagi partisipasi sosial dan distribusi pengetahuan, tetapi juga menuntut upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan inklusivitas. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan masyarakat digital yang cermat menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi di Surabaya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi telah merekonfigurasi relasi kekuasaan dan akses pengetahuan di masyarakat Surabaya secara signifikan. Struktur dominasi tradisional mengalami pergeseran, di mana aktor sosial yang mampu memanfaatkan teknologi digital memperoleh legitimasi dan pengaruh baru, sementara akses pengetahuan menjadi lebih demokratis namun tetap dipengaruhi oleh kesenjangan digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi sosial yang dipicu oleh digitalisasi bersifat multidimensional, mencakup aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya, sehingga teori transformasi sosial tetap relevan untuk menjelaskan interaksi kompleks antara teknologi, aktor sosial, dan struktur masyarakat lokal.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pemerintah kota Surabaya, institusi pendidikan, dan komunitas lokal berkolaborasi dalam memperkuat literasi digital dan infrastruktur teknologi, khususnya bagi kelompok rentan atau wilayah pinggiran, untuk mengurangi kesenjangan digital. Selain itu, pengembangan platform partisipatif yang aman dan inklusif dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik, sementara pelatihan kritis terhadap penggunaan informasi digital perlu diintensifkan untuk memastikan demokratisasi pengetahuan berjalan efektif dan etis. Pendekatan strategis ini akan memperkuat pemberdayaan sosial dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan di Surabaya.

REFERENSI

- [1] Agustina, Laili Dwi, Nur Fitri Ana Melati, Febian Ragil Prawesti, and Fierda Nurany. "Smart City: Upaya Pembangunan Kota Surabaya." *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* (2023): 98-112.
- [2] Kanchan, Sushim, and Abhay Gaidhane. "Social media role and its impact on public health: a narrative review." *Cureus* 15, no. 1 (2023).
- [3] Sienatra, Krismi Budi, Aria Ganna Henryanto, Adrie Oktavio, Devi Rahnjen Wijayadne, Christina Sudyasjayanti, and William Santoso. "Akselerasi Digitalisasi Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota Surabaya Dalam Rangka Meraih Keunggulan Kompetitif Pasca COVID-19." *Madaniya* 4, no. 2 (2023): 712-719.
- [4] Mauludi, Achmad, and Mochammad Wispandono. "Pengaruh Penguasaan Teknologi Informasi Digital dan Pengetahuan Manajemen Terhadap Kinerja Driver Go-jek Online (Studi Kasus Komunitas Oktouber Surabaya)." *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)* 4, no. 3 (2024).
- [5] Gulo, Agustinus. "Revitalisasi budaya di era digital dan eksplorasi dampak media sosial terhadap dinamika Sosial-Budaya di tengah masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)* 3, no. 3 (2023).
- [6] Abiyyu, Muhammad Farras, and Isa Anshori. "Relasi Kuasa antara Kepala Sekolah dan Guru: Kajian Teoretis terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kinerja." *DIAJAR: Jurnal*

- Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 4 (2025): 677-686.
- [7] Swastiwi, Anastasia Wiwik. *Globalisasi dan Media: Konvergensi Budaya dan Komunikasi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- [8] Irawan, Enjang Pera, Yuni Retnowati, Putu Eka Sura Adnyana, Rofiq Anwar, and Fikar Candra. *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.
- [9] Znagui, Zineb. "Examining factors influencing the emergence of a knowledge society: an explorative study." *Journal of e-Learning and Knowledge Society* 20, no. 2 (2024): 28-41.
- [10] Sinulingga, Sadepa Putri Br, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analysis Of Challenges And Opportunities In The Development Of Information And Communication Technology In The Digital Era: Future Perspective." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 25-35.
- [11] Swarjana, I. Ketut, and MPH SKM. *Metodologi Penelitian Kesehatan: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2023.
- [12] Fathurokhmah, Fita. "Lanskap dinamika kekuasaan industri media di Indonesia: Perspektif politik dan ekonomi." *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)* 10, no. 1 (2021): 67-84.
- [13] Eko Wahyunto, M. M. *Manajemen Komunikasi Digital*. CV. Mitra Edukasi Negeri, 2025.
- [14] Rahma, Ayu Azizah Raodhatur, Hilma Ardianti, and Khaliq Firman. "Peran media sosial dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer." *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2024): 24-29.
- [15] Razmjoo, Armin, Poul Alberg Østergaard, Mouloud Denai, Meysam Majidi Nezhad, and Seyedali Mirjalili. "Effective policies to overcome barriers in the development of smart cities." *Energy Research & Social Science* 79 (2021): 102175.
- [16] Noak, Piers Andreas, Gede Indra Pramana, Dinda Arifa Putri, Fitria Siti Munawarroh, and Della Putri Wulandari. "Ekonomi Politik Platformisasi dan Datafikasi dalam Gig Economy: Studi Kasus Bali dan Jawa Timur." *Jurnal Transformatif* 10, no. 1 (2024): 60-88.
- [17] Hafidz, AM M. *Kiai Langgar & Digitalisasi Transaksi Ekonomi: Degradasi Otoritas dan Fungsi Sosial Kiai Langgar di Sektor Ekonomi*. Penerbit NEM, 2025.
- [18] Wardoyo, Cipto, Aldi Maizuari, Annisa Ayu Salsabila, Annisa'Mar'atus Sholikhah, Dhita Aulia Rahmayanti, Dita Indah Sari, Eka Putri Surya et al. *Menuju Perekonomian Indonesia Berkelanjutan*. Kreatifa Publishing House, 2025.
- [19] Padua, Donatella. *Digital Cultural Transformation*. Springer International Publishing, 2021.
- [20] Muta'ali, Lutfi. *Geografi Pemerintahan: Peran Geografi dalam Manajemen Pemerintahan*. Henry Bennett Nelson, 2024.
- [21] Azizah, Siti, S. Pt, M. Sos, and M. Commun. "Pengembangan Masyarakat." *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital* 54 (2025).
- [22] Jayadih, M., H. Eka Suhardi, and Bibin Rubini. *Strategi & peningkatan kualitas layanan guru: Transformasi melalui kepemimpinan, teknologi, kreativitas dan entrepreneurship*. Jakad Media Publishing, 2024.
- [23] Anshori, Isa. "Problem-Based Learning Remodelling Using Islamic Values Integration and Sociological Research in Madrasas." *International Journal of Instruction* 14, no. 2 (2021): 421-442.
- [24] Anshori, Isa. "Sosiologi pendidikan integratif." (2025).
- [25] Anshori, Isa, Zainal Mukhlis, and Almi Novita. "Identity, Cult, and Charisma: The Contestation of Online Da'wah on @halimahalaydrus's Instagram Account." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2025): 206-222.